



ANALISIS KEBIJAKAN PERENCANAAN KEUANGAN DI FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA, UIN ALAUDDIN MAKASSAR

FINANCIAL PLANNING POLICY ANALYSIS AT THE FACULTY OF ADAB AND HUMANIORA, UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Naskah diterima: 1 September 2023 | Revisi: 1 September 2023 – 6 Mei 2024 | Disetujui: 24 Mei 2024

Sitti Jauhari

Fakultas Adab dan
Humaniora, Universitas
Islam Negeri Alauddin
Makassar

Email: [stjauhari60@
gmail.com](mailto:stjauhari60@gmail.com)

Abstrak

Policy paper ini menguraikan masalah kebijakan perencanaan keuangan di Fakultas Adab dan Humaniora (FAH) UIN Alauddin Makassar, yang berfokus pada: (1) proses penyusunan kebijakan perencanaan keuangan, (2) elemen dan ketentuan yang tercantum dalam kebijakan perencanaan keuangan, (3) implementasi kebijakan perencanaan keuangan di FAH UIN Alauddin Makassar, serta (4) monitoring dan evaluasi efektivitas dan efisiensi kebijakan perencanaan keuangan. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan kunci, observasi, dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan perencanaan keuangan di FAH UIN Alauddin Makassar telah dirumuskan dengan baik dan melibatkan berbagai pihak. Namun terdapat beberapa kendala dalam implementasi kebijakan, seperti kurangnya pemahaman oleh staf dan keterbatasan sumber daya serta monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi kebijakan perencanaan keuangan. Dengan demikian, kebijakan perencanaan keuangan di FAH UIN Alauddin Makassar perlu dioptimalkan dengan: (1) Meningkatkan pemahaman staf tentang kebijakan melalui pendidikan dan pelatihan; (2) Memperkuat sistem monitoring dan evaluasi untuk memastikan efektivitas dan efisiensi kebijakan; serta (3) Meningkatkan koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam perencanaan keuangan.

Kata Kunci: Kebijakan; Perencanaan Keuangan, Manajemen, Analisis Keuangan, Evaluasi, Monitoring

Abstract

This Policy paper describes financial planning policy issues at the Faculty of Adab and Humanities (FAH) UIN Alauddin Makassar, which focuses on (1) the process of preparing financial planning policies, (2) elements and provisions contained in financial planning policies, (3) implementation financial planning policies at FAH UIN Alauddin Makassar, as well as (4) monitoring and evaluating the effectiveness and efficiency of financial planning policies. This study uses a qualitative method with a case study approach, where data is collected through interviews with key informants, observation, and documentation. The results show that the financial planning policy at FAH UIN Alauddin Makassar has been well formulated and involves various parties. However, there are several obstacles in implementing policies, such as a lack of understanding by staff and limited resources as well as monitoring and evaluation of the effectiveness and efficiency of financial planning policies. Thus, financial planning policies at FAH UIN Alauddin Makassar need to be optimized by: (1) Increasing staff understanding of policies through education and training; (2) Strengthening monitoring and evaluation systems to ensure policy effectiveness and efficiency; and (3) Improving coordination between various parties involved in financial planning.

Keywords: Policy, Financial Planning, Management, Financial Analysis, Evaluation, Monitoring

PENDAHULUAN

Perguruan tinggi memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk dan menghasilkan generasi mendatang yang berkualitas dan berdaya saing. Namun, dalam upaya mencapai tujuan mulia tersebut, tidak mudah, karena perguruan tinggi seringkali dihadapkan pada tantangan yang signifikan, salah satunya adalah pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien. Sehingga penganggaran yang tepat dan perencanaan yang matang menjadi fondasi utama untuk menjamin kelancaran berbagai kegiatan akademik dan pengembangan perguruan tinggi (Abidin, 2017).

Sebagaimana yang diketahui bahwa perguruan tinggi harus menjalankan tridharma-nya, yakni: pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang mana semua itu dapat dioperasikan jika rencana dan implementasi anggaran tersusun dan terlaksana dengan optimal.

Kendati pentingnya perencanaan anggaran yang baik, kenyataannya banyak perguruan tinggi yang menghadapi hambatan dalam mengimplementasikan rencana anggaran. Beberapa kegiatan yang semestinya menjadi pilar utama dalam peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, sayangnya seringkali harus terhenti atau bahkan tidak dapat terealisasi akibat kendala-kendala dalam penganggaran dan perencanaan yang kurang matang, sementara *budgeting planning* memiliki pengaruh yang kuat dalam penyerapan anggaran (Ratag, Kumenaung, & Engka, 2019).

Meskipun peran yang sangat penting ini diakui secara luas, banyak perguruan

tinggi di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan serius dalam hal perencanaan keuangan. Masalah-masalah ini dapat berkisar dari penganggaran yang tidak memadai, manajemen keuangan yang tidak efisien, hingga komunikasi yang kurang efektif antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses perencanaan keuangan. Sehingga hal tersebut tentu dapat memengaruhi mutu pendidikan itu sendiri (Suryana, 2020). Tidak lepas juga dari perbincangan otonomi keuangan perguruan tinggi yang idealnya memberikan kebebasan kepada perguruan tinggi untuk mengelola anggarannya, namun sebagian menyatakan belum tahu apa arahnya bahkan masih diperdebatkan (Adam & Lanontji, 2021).

Pada kompleksitas dunia pendidikan seperti itu, menganalisis kebijakan perencanaan penganggaran di perguruan tinggi muncul sebagai tonggak penting dalam menjalankan misi pendidikan yang berkualitas. Bukan semata-mata nominal angka, tetapi tentang cara yang tepat untuk mengarahkan sumber daya ke arah yang paling efektif dan efisien guna mewujudkan setiap rencana yang telah dibuat. Apalagi saat ini, setiap kampus berlomba untuk mendapatkan rekognisi dampak dari globalisasi, sehingga mengharuskan ada strategi kongkret (Anggreni & Suartini, 2019). Untuk mencapai hal tersebut perlu adanya kebijakan terkait perencanaan dan pengalokasian anggaran keuangan yang efektif dan efisien.

Perguruan tinggi menjadi pilar utama dalam pembentukan generasi yang berkualitas dan berdaya saing. Di balik kesuksesan akademik dan perkembangan intelektual mahasiswa, ada upaya besar yang diperlukan dalam perencanaan keuangan yang efisien dan berkelanjutan. Dalam era

ketidakpastian (*uncertainty*) ekonomi dan persaingan global yang semakin ketat saat ini, perguruan tinggi yang berperan dalam menyediakan pendidikan berkualitas dan fasilitas yang memadai (Lutfiani, Rahardja, & Manik, 2020) tidak bisa diabaikan agar dapat menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan kebutuhan (*link and match*) (Setiawan & Lenawati, 2020).

Ketidakcukupan atau kurangnya perhatian terhadap anggaran di perguruan tinggi dapat memiliki dampak yang serius pada berbagai aspek kegiatan pendidikan dan pengelolaan institusi. Apalagi saat ini sudah diakui bahwa semakin tinggi pendidikan, maka semakin mahal (Nurhuda, 2022). Dampaknya, dapat terjadi penurunan kualitas pendidikan, fasilitas tidak memadai, menghambat inovasi dan pengembangan, rencana yang hanya sebatas rencana yang sulit terwujud, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penting bagi setiap perguruan tinggi untuk selalu mengkaji kebijakan (Safitri, Nuarizal, & Gistituati, 2021) anggaran, termasuk di dalamnya perencanaan-perencanaannya.

Dengan adanya analisis kebijakan perencanaan-penganggaran yang mendalam, perguruan tinggi mampu membentuk fondasi transparansi yang baik pada publik (Lussiana & Fidiana, 2019), (Rosita, 2018), (Abidin, 2017). Segala aliran dana dari berbagai sumber dan penggunaannya untuk berbagai aktivitas, yakni tridharma perguruan tinggi, dapat tersaji dengan jelas. Hal ini tidak hanya menghasilkan keyakinan dalam pengelolaan dana, tetapi juga memicu peningkatan akuntabilitas di kalangan pengelola perguruan tinggi (Setyanto, Ridloah, & Suryasai, 2022).

Analisis kebijakan perencanaan penganggaran juga membekali pengambil keputusan,

yang dalam hal ini adalah pimpinan perguruan tinggi, dengan wawasan yang lebih baik. Data dan informasi yang terkumpul membantu dalam membuat keputusan strategis, mengidentifikasi tren pengeluaran, dan memproyeksikan kebutuhan anggaran di masa depan. Dengan informasi yang kuat, perguruan tinggi dapat merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Memang saat ini sudah banyak tata kelola anggaran, termasuk di perguruan tinggi, menerapkan sistem informasi berbasis teknologi yang memudahkan para pembuat kebijakan untuk merumuskan dan memutuskan hal-hal yang terkait dengan anggaran pembiayaan di kampusnya.

Dalam upaya untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan dana, perguruan tinggi sebaiknya melakukan analisis kebijakan anggaran. Biasanya, tim seperti itu terdiri dari ahli keuangan, staf akademik, dan pemangku kepentingan lainnya yang bekerja bersama untuk menggali lebih dalam isu-isu pengelolaan anggarannya.

Hasil dari analisis ini dapat memberikan perubahan yang signifikan dalam penyelenggaraan perguruan tinggi tersebut. Dengan data dan informasi yang lebih kuat tentang bagaimana dana dialokasikan, pimpinan perguruan tinggi dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dalam alokasi dana. Mereka mengidentifikasi area-area yang memerlukan lebih banyak investasi, seperti fasilitas penelitian dan peningkatan gaji staf pengajar untuk mempertahankan bakat terbaik.

Perguruan tinggi juga memanfaatkan analisis kebijakan anggaran untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko keuangan. Mereka

merancang strategi untuk mengatasi potensi defisit anggaran dan fluktuasi pendapatan. Hal ini memberikan rasa percaya diri dalam keberlanjutan finansial mereka.

Kondisi seperti yang diuraikan di atas juga terjadi di Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Beragam rencana kegiatan, baik itu kegiatan fakultas maupun program studi ‘mandek’ akibat perencanaan anggaran yang kurang tersusun dengan baik, bahkan begitu sulitnya untuk proses pencairan anggaran yang ada.

Dalam rangka memahami lebih dalam dinamika perencanaan keuangan di perguruan tinggi, artikel ini bertujuan untuk melakukan analisis menyeluruh terhadap proses dan kebijakan perencanaan keuangan, kendala yang dihadapi, manajemen keuangan yang diterapkan, serta efektivitas komunikasi dalam konteks di perguruan tinggi.

Studi kasus yang diulas dalam artikel ini mengacu pada kebijakan perencanaan keuangan di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, yang memberikan wawasan tentang bagaimana perguruan tinggi mengelola aspek-aspek keuangan mereka.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah kebijakan perencanaan keuangan di Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Alauddin Makassar sebagai berikut:

1. Ketidakjelasan tujuan dan sasaran kebijakan keuangan, karena kurangnya kejelasan dalam merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan keuangan

yang terukur dan terarah. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mengukur efektivitas kebijakan keuangan dan mencapai target yang diinginkan.

2. Mekanisme penyusunan anggaran masih terkesan sentralistik dan kurangnya partisipasi dari unit-unit kerja di lingkungan fakultas. Hal ini menyebabkan kurangnya rasa memiliki dan akuntabilitas terhadap anggaran yang telah ditetapkan.
3. Alokasi anggaran yang belum optimal, karena belum mempertimbangkan secara memadai kebutuhan dan prioritas program studi dan unit-unit kerja di fakultas. Distribusi anggaran masih terkesan kaku dan kurang fleksibel dalam merespons perubahan kebutuhan dan kondisi fakultas.
4. Kurangnya transparansi dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran serta minimnya akuntabilitas dalam penggunaan anggaran, sehingga sulit untuk melacak dan mengevaluasi efektivitasnya.
5. Lemahnya kapasitas SDM dalam pengelolaan keuangan, karena kurangnya pemahaman dan kompetensi SDM dalam mengelola keuangan secara efektif dan efisien. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam menyusun perencanaan keuangan yang matang dan menjalankan kebijakan keuangan dengan baik.
6. Sistem monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan keuangan belum berjalan dengan optimal. Hal ini menyebabkan sulit untuk mengetahui efektivitas kebijakan dan melakukan penyesuaian yang diperlukan.

Adapun dampak yang ditimbulkan dari permasalahan di atas di antaranya:

1. Terhambatnya pencapaian tujuan dan sasaran fakultas.
2. Inefisiensi dan inefektivitas penggunaan anggaran.
3. Rendahnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan.
4. Menurunnya motivasi dan kinerja pegawai, dosen, dan staf.

Identifikasi masalah ini sebagai upaya untuk mengurai masalah serta mencari solusi yang inovatif untuk mengatasi kendala-kendala di atas dengan mengoptimalkan perencanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran di lingkungan fakultas, yang seringkali berubah-ubah serta menjadi dasar pengambilan kebijakan bagi pimpinan fakultas dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran di Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Alauddin Makassar.

Adapun akar masalah sehingga perencanaan dan pengelolaan anggaran tidak berjalan efektif dan efisien di Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Alauddin Makassar dapat diilustrasikan seperti terlihat dalam gambar pohon masalah berikut ini.

Dalam menguraikan masalah di atas, penulis menggunakan teori Siklus Kebijakan (*Policy Cycle Theory*), yaitu proses ideal yang menjelaskan bagaimana kebijakan harus dirancang, diterapkan, dan dinilai. Menurut William N. Dunn bahwa siklus kebijakan terdiri dari lima tahap (Dunn, 2003: 24), yaitu:

1. Penyusunan agenda. Tahapan perencanaan program dan pengelolaan anggaran di Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Alauddin Makassar disusun berdasarkan hasil rapat RKA/ KL dengan pihak Rektorat, yang melibatkan Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan. Dari rapat inilah dirumuskan program-program fakultas yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing program studi (jurusan).
2. Formulasi kebijakan. Dekan Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Alauddin Makassar menyusun program kerja dan keuangan sesuai kebutuhan masing-masing program studi dalam bentuk Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dengan melibatkan bagian perencanaan



Gambar 1. Akar Masalah

dan pengelolaan keuangan serta pihak-pihak terkait.

3. Adopsi kebijakan. Dalam menyusun Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), Dekan dan pihak-pihak terkait di Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Alauddin Makassar mengacu pada kebijakan Rektorat dan Renstra Kementerian Agama dengan menyesuaikan kebutuhan masing-masing bidang dan program studi yang ada.
4. Implementasi kebijakan. Setelah Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) disusun, namun pihak fakultas seringkali tidak menjalankan program tersebut sebagaimana yang telah disepakati, karena pada saat yang bersamaan muncul agenda lain yang dianggap lebih penting, sehingga bagian keuangan begitu sulit untuk cepat merealisasikan anggaran tersebut. Hal ini terjadi, karena kurangnya monitoring dan evaluasi, di mana terkadang ada kegiatan di fakultas dan pada tingkat jurusan tidak terencana dengan baik. Sementara Uang Persediaan (UP) pun sangat terbatas, sehingga sebagian jurusan di fakultas ini menggunakan dana pribadi agar tetap dapat melaksanakan kegiatan lainnya.
5. Penilaian kebijakan. Dekan dan pihak terkait di Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Alauddin Makassar memenuhi sesuai ketentuan Rektorat dan Renstra Kementerian Agama dalam hal pembuatan kebijakan. Namun sistem monitoring dan evaluasi perencanaan dan pengelolaan anggaran di Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Alauddin Makassar masih lemah dalam 3 (tiga) hal, yaitu: (a) kurangnya indikator

kinerja yang jelas untuk mengukur efektivitas kebijakan, (b) kurangnya data dan informasi yang akurat untuk evaluasi, serta (c) kurangnya budaya evaluasi di lingkungan fakultas.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi *problem statement* dalam artikel ini adalah, bahwa perencanaan keuangan di Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Alauddin Makassar tidak berjalan efektif dan efisien, karena lemahnya monitoring dan evaluasi program dan kegiatan oleh pimpinan fakultas dan pihak terkait serta didukung oleh kelemahan kapasitas dan kompetensi SDM pengelolaan keuangan, sehingga sulit menyusun perencanaan keuangan yang matang, melaksanakan anggaran dengan baik, dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan keuangan. Hal ini membawa berbagai akibat negatif bagi organisasi, seperti:

1. Kurangnya kepastian dalam pencapaian tujuan program dan kegiatan, karena tidak ada data dan informasi yang memadai untuk mengukur kemajuan dan dampaknya. Sehingga potensi inefisiensi penggunaan sumber daya, seperti dana, waktu, dan tenaga kerja, karena tidak ada kontrol dan evaluasi yang memadai. Hal ini dapat terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan dana, karena kurangnya pengawasan dan akuntabilitas.
2. Pimpinan fakultas dan pihak terkait tidak memiliki basis informasi yang memadai untuk membuat keputusan yang tepat dan strategis terkait program dan kegiatan. Sehingga keputusan yang

diambil berpotensi tidak sesuai dengan kebutuhan dan prioritas organisasi, karena tidak didasarkan pada data dan analisis yang akurat. Karena itu, risiko kegagalan program dan kegiatan meningkat karena kurangnya perencanaan dan antisipasi yang matang.

3. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan pegawai tentang pengelolaan keuangan yang efektif dan akuntabel yang berakibat pada: (a) ketidakmampuan untuk menyusun laporan keuangan yang akurat dan transparan; (b) kesulitan dalam mengelola risiko keuangan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku; serta (c) ketidakmampuan untuk memberikan saran dan analisis keuangan yang tepat kepada pimpinan fakultas dan pihak terkait.

Tujuan dan Manfaat

Penulisan artikel ini bertujuan untuk melakukan analisis menyeluruh terhadap proses dan kebijakan perencanaan dan pengelolaan keuangan, kendala yang dihadapi, manajemen keuangan yang diterapkan, serta efektivitas komunikasi dalam konteks perguruan tinggi. Sedangkan manfaat tulisan ini, selain memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak pengambil kebijakan, juga memberikan wawasan berharga tentang bagaimana perguruan tinggi mengelola aspek-aspek keuangan.

Kerangka Teori dan Konseptual

Perencanaan Keuangan

Perencanaan keuangan sangat penting untuk membantu individu, perusahaan,

atau institusi dalam mengelola keuangan mereka dengan cara yang efisien dan sesuai dengan tujuan mereka. Beberapa teori terkait perencanaan keuangan telah diuraikan oleh banyak kajian.

Seorang pakar bernama Lawrence J. Gitman, dalam bukunya yang berjudul "*Principles of Managerial Finance*" menjelaskan konsep perencanaan keuangan dan strategi pengelolaan dana dalam organisasi. Menurutnya, perencanaan keuangan (*financial manager*) dilakukan oleh manajer keuangan yang cerdas, ia bekerja atas nama pemilik perusahaan dengan melakukan operasi dan investasi keputusan yang manfaatnya melebihi biayanya (Gitman & Zutter, 2015), sehingga pendidikan tentang perencanaan keuangan mesti diajarkan.

Sementara itu, Abraham M. Bertisch mengatakan bahwa "*Financial planning can be indeed as the careful preparation ... It involves mapping strategies to achieve your defined goals*", yang maksudnya bahwa perencanaan keuangan sesungguhnya adalah persiapan yang penuh dengan ketelitian. Perencanaan keuangan menitikberatkan pada strategi pemetaan (keuangan) untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan pula.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan keuangan memiliki peran yang sangat signifikan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Ia mesti dipelajari dan dilakukan oleh manajer (individu ataupun beberapa orang) yang cerdas dan memahami secara utuh konsep dan prinsip dalam perencanaan keuangan, misal: tujuan organisasi, memaksimalkan keuangan, etika bisnis, akuntasni, dan sebagainya.

Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran merupakan hal yang penting bagi individu maupun organisasi untuk mencapai tujuan keuangan mereka. Para ahli dalam bidang keuangan dan manajemen telah banyak memberikan pendapat tentang pentingnya dan manfaat dari perencanaan anggaran.

Harold Bierman Jr. berpendapat bahwa “Perencanaan anggaran adalah proses yang berkelanjutan yang melibatkan penetapan tujuan keuangan, mengembangkan rencana untuk mencapainya, dan melacak kemajuan Anda. Ini adalah alat penting bagi individu dan organisasi untuk mencapai kesuksesan keuangan.”

Para ahli sepakat bahwa perencanaan anggaran adalah alat yang penting untuk mencapai tujuan keuangan. Ini membantu melacak penggunaan keuangan, membuat keputusan keuangan yang lebih baik, dan mencapai stabilitas keuangan.

Pengelolaan Keuangan Pendidikan

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 47 menyatakan, “Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.” Sementara pada Pasal 48 menyatakan, “Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Dengan demikian, pengelolaan keuangan pendidikan mesti mengikuti prinsip tersebut, sehingga manajemen keuangan (Departemen Pendidikan Nasional, 2002) yang meliputi: tindakan pencatatan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan dapat terlaksana dengan baik.

Struktur Organisasi dan Tata Kelola

Struktur organisasi fakultas ini dan proses pengambilan keputusan keuangan menjadi kunci dalam pemahaman yang holistik terhadap bagaimana keuangan diatur, siapa yang terlibat dalam pengelolaan keuangan, dan bagaimana proses pengambilan keputusan dijalankan. Bagian penting dari penelitian ini adalah memahami struktur organisasi yang terkait dengan perencanaan keuangan, termasuk bagaimana proses pengambilan keputusan keuangan diimplementasikan.

Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran

Proses perencanaan dan penganggaran adalah inti dari kerangka keuangan. Analisis mendalam tentang bagaimana fakultas ini merencanakan dan mengalokasikan sumber daya keuangannya untuk mendukung program akademik, pengembangan kurikulum, riset, dan kegiatan ekstrakurikuler merupakan aspek penting dalam memahami strategi pengelolaan keuangan fakultas ini.

Kendala dan Tantangan

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana keuangan fakultas, khususnya terkait dengan keterbatasan dana yang mungkin menghambat pencapaian rencana kegiatan, menjadi fokus penting. Mengetahui bagaimana fakultas menangani keterbatasan dana serta kendala-kendala lainnya dalam merencanakan dan melaksanakan anggaran adalah hal yang vital dalam pemahaman akan dinamika keuangan fakultas ini.

Evaluasi Efektivitas

Evaluasi sejauh mana kebijakan perencanaan keuangan telah berhasil dan efektif dalam mencapai tujuan institusi adalah bagian penting dari kerangka konseptual ini. Hal ini melibatkan penilaian terhadap bagaimana fakultas mengevaluasi strategi keuangan mereka, penyesuaian terhadap perubahan lingkungan, serta sejauh mana kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan akademik.

METODOLOGI

Dalam proses penulisan makalah kebijakan ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan pada studi kasus (*case study*), yakni pendekatan yang memungkinkan penulis untuk memahami suatu isu atau permasalahan dengan menggunakan suatu kasus (Cresswell, 2007).

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan data-data artikel yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pimpinan dan bendahara fakultas. Wawancara ini dilakukan dengan mendalam, yakni teknik yang memungkinkan peneliti untuk memperoleh pandangan mendalam, penjelasan rinci, dan pengalaman pribadi dari narasumber terkait pengetahuan, kendala dan tantangan yang mereka rasakan terkait dengan perencanaan anggaran di fakultas. Beberapa dokumentasi dari fakultas juga menjadi penguat dari isi tulisan ini.

Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan cermat dan terstruktur. Sebelum wawancara dilakukan, penulis merancang panduan wawancara yang berisi serangkaian pertanyaan terkait aspek-aspek

perencanaan anggaran, hambatan yang dihadapi, dan solusi yang diusulkan. Wawancara berlangsung dalam suasana yang terbuka dan santai, memungkinkan narasumber untuk berbicara dengan bebas. Narasumber yang dipilih untuk wawancara adalah bendahara fakultas yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam pengelolaan anggaran di program studi. Pemilihan narasumber ini dilakukan berdasarkan pertimbangan pengetahuan dan keterlibatan langsung mereka dalam perencanaan anggaran.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dianalisis dengan teknik analisis naratif (*narrative inquiry*) (Caine, Clandinin, & Lessard, 2002), yakni metode penelitian yang fokus pada pemahaman dan interpretasi narasi atau cerita yang diceritakan oleh individu. Metode ini umumnya digunakan untuk menggali makna dalam cerita-cerita yang diberikan oleh informan, dan untuk memahami bagaimana pengalaman, peristiwa, atau pandangan direpresentasikan melalui narasi. Dari sini peneliti dan para pembaca memahami lebih dalam tantangan dan hambatan dalam perencanaan anggaran yang diungkapkan oleh narasumber. Data-data akan diverifikasi lalu selanjutnya akan ditarik kesimpulan serta rekomendasi yang diberikan pada bagian akhir tulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan yang matang merupakan aspek kritis dalam manajemen keuangan dan operasional di berbagai jenis organisasi, termasuk pada perguruan tinggi, tingkat fakultas. Tanpa adanya perencanaan yang matang, kegiatan akan terkendala

dilaksanakan, bahkan tidak diadakan sama sekali.

Apa yang telah diuraikan sebelumnya, juga dialami oleh Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, yang membawahi 4 (empat) program studi, yaitu: Bahasa dan Sastra Arab, Bahasa dan Sastra Inggris, Ilmu Perpustakaan, serta Sejarah dan Kebudayaan Islam. Selain keempat program tersebut, di fakultas ini juga memiliki lembaga-lembaga kemahasiswaan, seperti dewan mahasiswa dan himpunan jurusan pada keempat program studi tersebut, yang mana kesemuanya mesti mendapatkan perhatian dalam segi penganggaran.

Dalam penganggarnya, selalu mengalami masalah atau pun keterlambatan pencairan, sehingga tergambar bagaimana pelaksanaan kegiatan baik pada tingkat fakultas, program studi, dan juga kegiatan mahasiswa selalu mengalami hambatan jika tidak diperjuangkan dengan maksimal. Situasi seperti itu sudah dibuktikan oleh beberapa kajian yang pada umumnya mengatakan bahwa tidak baik, sehingga mesti ada langkah-langkah konkret dalam mengatasinya. Untuk itu, berikut ini akan diuraikan hasil wawancara tentang kondisi penganggaran di fakultas tersebut serta pembahasannya.

Gambaran Umum Rencana Penganggaran Kegiatan Fakultas

Setiap kegiatan yang hendak dilakukan sebaiknya direncanakan dengan matang. Dalam konteks fakultas, perencanaan anggaran menjadi jantung dari pengelolaan keuangan yang berkelanjutan. Dengan merencanakan penggunaan anggaran dengan bijak, fakultas dapat mengalokasikan dana untuk mendukung berbagai aspek

penting, mulai dari pengembangan kurikulum hingga penelitian inovatif. Ini pastinya membantu fakultas mencapai visi dan misi serta rencana strategis yang dibuat.

Dari hasil wawancara terkait dengan gambaran rencana penganggaran di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar menunjukkan bahwa dalam penetapan anggaran kegiatan, fakultas/program studi duduk bersama merancang hal tersebut, yang *output*-nya ialah menjadi Pedoman Operasional Kegiatan (POK) fakultas.

“Ada waktu tertentu kita diundang oleh pimpinan kampus untuk rapat RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga) di Rektorat yang dihadiri oleh beberapa pihak, termasuk seluruh wakil dekan 2 Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan. Dari rapat inilah akan disetujui apa-apa saja rencana fakultas kita yang akan dilaksanakan. Tentu rencana itu semuanya juga telah disusun oleh masing-masing prodi”, (Jauhari, Wawancara dengan Wakil Dekan II, 2023)

Perencanaan penganggaran yang telah tersusun sesuai mekanisme yang ada adalah langkah awal yang penting dan positif dalam pengelolaan keuangan di fakultas ini. Namun, apakah perencanaan penganggaran tersebut dianggap baik atau tidak akan tergantung pada sejauh mana perencanaan tersebut dapat memenuhi beberapa kriteria penting, misalnya ketepatan dan akurasi proyeksi keuangan.

Selain itu, terkadang ada kegiatan yang ada di fakultas dan juga pada tingkat jurusan tidak terencana dengan baik, sehingga menyulitkan bagian keuangan untuk cepat merealisasikan anggaran. Misalnya, ada kegiatan-kegiatan yang sebelumnya telah direncanakan, namun tidak dapat dilaksanakan, karena satu dan lain hal, sehingga hal ini menyebabkan harusnya

direvisi kembali anggaran yang telah ada, dan untuk melakukan revisi tentu akan menyita waktu lagi. Demikian yang disampaikan oleh bendahara fakultas:

“Baru-baru ini ada program studi yang ingin melaksanakan sebuah kegiatan, namun kegiatan tersebut tidak ada dalam perencanaan. Entah apakah ia sebelumnya telah melihat apa yang ada dan apa yang tidak ada dalam rancangan sebelumnya” (Jauhari, Wawancara dengan Bendahara Fakultas, 2023).

Dalam situasi seperti itu, penganggaran partisipatif, yakni melibatkan semua unsur yang berkepentingan duduk bersama (Shah, 2007), menjadi penting untuk diperhatikan oleh semua karena dapat memberikan pengaruh yang signifikan (Lesmana, 2011).

Pada umumnya, kegiatan yang akan dilaksanakan di fakultas ini menggunakan Uang Persediaan (UP), yang menurut bendahara fakultas, “dapat dikatakan kurang untuk digunakan kepada semua kegiatan di fakultas sepanjang tahun berjalan”. Faktanya, memang anggaran pendidikan di Indonesia dapat dikatakan masih miris (Ananta, 2023), akan tetapi pada tahun 2023 ini anggarannya yang paling tinggi (Santika, 2023).

Uang Persediaan (UP) yang tersedia di fakultas ini sebesar 50 juta, yang mana anggaran ini akan diperuntukkan bagi kegiatan fakultas, program studi, serta kegiatan mahasiswa. Adapun untuk peruntukan ke 50 juta UP tersebut ialah tidak dibagi secara merata, namun siapa saja yang akan melaksanakan kegiatannya lebih dahulu, maka akan diberikan UP sesuai dengan rencana anggaran yang dibutuhkannya.

“Besaran UP ini tidak berdasarkan prodi, tetapi tergantung dari berapa usulan anggaran kegiatan yang diusulkan di POK-nya. Dan pemberiannya itu tergantung

dari siapa yang mengusulkan lebih awal. Misalnya prodi Ilmu Perpustakaan ingin mengadakan pengabdian kepada masyarakat, maka UP itu akan diberikan sesuai dengan berapa anggarannya”, (Jauhari, Wawancara dengan Bendahara Fakultas, 2023).

Jadi, ketika UP tersebut telah digunakan, misal salah satu jurusan telah menggunakannya lalu jurusan tersebut ingin melaksanakan kegiatan lainnya, maka ini harus menunggu terlebih dahulu agar dana UP yang telah digunakan tersebut dicairkan. Sementara untuk pencairannya membutuhkan laporan pertanggungjawaban, yang menurut bendahara, “terkadang lama sekali baru dilaporkan. Akibatnya, kegiatan lainnya terkendala untuk dilaksanakan.”

Jika uang persediaan fakultas atau jurusan telah habis digunakan, sementara masih ada kegiatan lain yang ingin dilaksanakan, ini bisa berdampak negatif para pengguna dana. Kredibilitas fakultas akan terkesan kurang baik pada dosen, mahasiswa, staf, dan pihak-pihak terkait lainnya. Dengan demikian, mesti ada kebijakan yang dilahirkan oleh pimpinan terkait hal tersebut. Misalnya, perlu disiapkan alternatif pembiayaan guna melaksanakan kegiatan yang sudah diakomodir oleh UP sebelumnya.

Terkait dengan alternatif di sini, menarik untuk dicatat bahwa sebagian jurusan di fakultas ini menggunakan dana pribadi agar tetap dapat melaksanakan kegiatan lainnya, yang menurut bendahara fakultas bahwa, “menggunakan uang pribadi pada kegiatan jurusannya ialah pelanggaran, tidak boleh.”

Dari sini terkesan bahwa sebagian jurusan mengambil alternatif yang sebenarnya memiliki resiko yang tinggi, misalnya saja jika dana pribadi tersebut tidak diakui,

sehingga tidak dapat dikembalikan oleh fakultas. Hal ini tentu sangat merugikan pihak jurusan, dan akan kembali dipertanyakan kredibilitas seperti yang diungkapkan di atas.

Selanjutnya, bendahara fakultas mengatakan bahwa “perencanaan juga sangat penting oleh jurusan. Misal, jika ada kegiatan rencana pengabdian kepada masyarakat, sebaiknya sudah disiapkan segalanya, misalnya tempatnya di mana, kapan, dan apa-apa biaya yang dibutuhkan.”

Untuk mengatasi dampak negatif tersebut, sangat penting untuk memprioritaskan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Transparansi dalam penggunaan dana dan komunikasi yang baik dengan semua pihak terkait dapat membantu terhindar dari berbagai konflik kepentingan. Jika dana sudah digunakan untuk kegiatan lainnya, maka langkah-langkah seperti mencari sumber dana alternatif atau merencanakan ulang alokasi sumber daya dapat membantu meminimalkan dampak gangguan terhadap rencana kegiatan yang sudah ada.

Demikian juga mesti disadari pada pihak jurusan atau fakultas, bahwa apa yang mesti dilakukan sebaiknya telah tertuang jelas pada rencana kegiatan mereka, yakni yang ada pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK). Jika ada kegiatan yang tidak ada pada POK tersebut, maka sebaiknya diusulkan untuk selanjutnya menunggu revisi POK dan persetujuannya. Hal tersebut disampaikan oleh bendahara fakultas, bahwa ada beberapa kegiatan yang sebenarnya tidak ada di POK, sehingga tidak mungkin dilaksanakan, sebelum direvisi terlebih dahulu, dan untuk merevisi itu membutuhkan waktu.

“POK telah disiapkan, namun terkadang ada jurusan yang ingin melaksanakan kegiatan yang tidak ada pada POK sebelumnya, sehingga tentu saja tidak dapat dilaksanakan sebelum direvisi terlebih dahulu. “Misalnya, yang terbaru ialah tiba-tiba ada perencanaan ingin membuat taman baca di fakultas, pada POK sebelumnya tidak ada hal tersebut, namun tetap ingin diadakan. Sehingga, solusinya ialah harus merevisi terlebih dahulu POK tersebut dan menunggu hasil revisi POK yang terbaru, setelah itu dapat dilaksanakan kegiatan tersebut.” (Jauhari, Wawancara dengan Bendahara Fakultas, 2023).

Dengan demikian, penyusunan rencana yang matang memiliki nilai yang sangat penting dalam menjalankan segala jenis kegiatan, termasuk di pendidikan tinggi. Dalam situasi bisnis atau organisasi mana pun, penyusunan rencana yang matang adalah langkah penting yang membantu menciptakan dasar yang kuat untuk keberhasilan dan pertumbuhan berkelanjutan.

Partisipasi dari para pengambil kebijakan di fakultas atau organisasi sangat penting dalam proses penganggaran dan pengambilan keputusan secara umum. Partisipasi ini memainkan peran kunci dalam memastikan transparansi, pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta, serta mendapatkan pandangan dan masukan dari berbagai sudut pandang (Premananda & Latrini, 2017). Dengan membangun budaya partisipasi yang kuat (Nazaruddin & Setyawan, 2012), organisasi dapat mengambil manfaat dari wawasan dan dukungan para pengambil kebijakan dalam menghadapi tantangan penganggaran maupun dalam mengambil keputusan strategis yang lebih luas.

Efektifitas Penganggaran

Sebagai lembaga pendidikan tinggi, kampus ini memainkan peran penting dalam

membentuk dan menghasilkan generasi berkualitas dan berdaya saing. Namun untuk mencapai tujuan ini, manajemen keuangan yang efektif sangatlah krusial. Salah satu aspek penting dari manajemen keuangan adalah perencanaan dan penganggaran yang memadai.

Di Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Alauddin Makassar, perencanaan penganggaran telah tersusun sesuai mekanisme yang ada, seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Meskipun demikian, dari pengamatan kami mengungkapkan bahwa efektivitas penganggaran masih kurang optimal.

Permasalahan utama terletak pada keterbatasan dana yang tersedia, yang mempengaruhi pelaksanaan rencana kegiatan. Meskipun perencanaan anggaran sudah terstruktur dengan baik, terkadang rencana-rencana tersebut tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena dana yang tersedia tidak mencukupi. Keterbatasan dana ini membawa implikasi besar pada pencapaian tujuan fakultas dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan. Tidak heran jika ada beberapa kegiatan yang diadakan seadanya saja, dengankatalaintidakmaksimaldikarenakan kurang memadainya anggaran. Hal ini tentu tidak dapat menyalahkan satu pihak saja, namun semua pihak, karena bisa jadi sejak dari perencanaan penganggarnya tidak tersusun dengan baik. Sehingga, kembali penting penganggaran partisipatif, seperti disebutkan sebelumnya.

Selain itu, terdapat kendala terkait dengan lambatnya laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Keterlambatan ini berdampak pada pencairan dana berikutnya, mengakibatkan penundaan dalam pelaksanaan kegiatan

selanjutnya. Keterlambatan laporan juga menunjukkan kelemahan dalam proses administrasi keuangan, yang dapat menghambat efisiensi penggunaan dana. Hal ini diakui oleh Bendahara Fakultas:

“Setiap kegiatan yang telah dilaksanakan, biasanya laporan pertanggungjawabannya sangat lama diberikan, sehingga pencairan untuk anggaran berikutnya ikut tertunda. Ini yang mesti diketahui oleh seluruh pihak pengguna anggaran”, (Setiawan & Lenawati, 2020).

Pola pikir dalam penganggaran juga menjadi perhatian. Penganggaran yang masih bersifat kaku dan tidak dinamis tidak memungkinkan penyesuaian cepat terhadap perubahan kebutuhan atau prioritas. Jurusan-jurusan harus mencari alternatif lain untuk merealisasikan kegiatan yang telah diprogramkan, menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara rencana dan realitas pelaksanaan.

Komunikasi antara pihak jurusan dan bendahara keuangan juga dinilai belum terjalin dengan baik. Kurangnya komunikasi ini dapat mempengaruhi pengelolaan dana dan pengambilan keputusan terkait anggaran. Keterbatasan koordinasi dan kolaborasi mempersulit efektivitas perencanaan dan pengelolaan keuangan fakultas.

Terakhir, kepemimpinan fakultas perlu mempertimbangkan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam pengelolaan anggaran. Kebijakan yang tepat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penganggaran, termasuk memastikan penggunaan dana sesuai dengan prioritas dan kebutuhan fakultas.

Secara keseluruhan, wawancara dengan informan kunci telah mengungkapkan bahwa meskipun perencanaan

penganggaran di Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Alauddin Makassar, sudah sesuai dengan mekanisme yang ada, efektivitas penganggaran masih belum optimal. Perbaikan dan peningkatan perencanaan, pelaporan, fleksibilitas, komunikasi, dan kepemimpinan diperlukan untuk memastikan pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan akuntabel demi mencapai tujuan fakultas.

Kendala Pelaksanaan Rencana Anggaran

Penganggaran adalah proses yang penting namun sering kali rumit. Setiap organisasi, baik besar maupun kecil, menghadapi tantangan dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan tujuan. Kendala dalam penganggaran juga adalah hal yang sangat lumrah dalam dunia pendidikan tinggi. Dari pengamatan yang dilakukan, di fakultas ini juga mengalami beberapa kendala yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Kurangnya komunikasi antarpihak yang berkepentingan dalam penyusunan anggaran

Dari hasil wawancara dengan bendahara fakultas, ditemukan bahwa salah satu kendala utama dalam perencanaan dan penyusunan dan penyerapan anggaran di fakultas ini adalah kurangnya komunikasi yang baik antara berbagai pihak yang terlibat. Pihak-pihak yang terlibat termasuk manajemen fakultas, jurusan, dan bagian keuangan. Komunikasi yang tidak memadai ini berdampak pada pemahaman yang kabur terkait tujuan anggaran, prioritas, dan kendala-kendala yang mungkin muncul.

Pihak keuangan tentu menginginkan semua kegiatan yang telah direncanakan oleh fakultas, jurusan, dan juga mahasiswa dapat terlaksana semua dengan anggaran yang sudah siap. Namun kenyataannya, tidak demikian, disebabkan karena rencana yang kurang matang tersebut. Seperti contoh kasus yang disebutkan sebelumnya. Sehingga memang sangat penting para pejabat dan pihak terkait untuk duduk bersama ketika menyusun rencana kegiatannya ke depan, dan sebaiknya turut serta melibatkan pihak keuangan di fakultas. Kurangnya komunikasi antar pihak yang berkepentingan menghasilkan beberapa dampak yang merugikan. *Pertama*, terjadi peningkatan risiko ketidaksesuaian antara alokasi anggaran dan kebutuhan nyata program studi. *Kedua*, hal ini mempengaruhi transparansi dalam penggunaan dana dan memberikan potensi bagi munculnya spekulasi negatif. *Ketiga*, kurangnya koordinasi berpotensi mengakibatkan pemborosan sumber daya dan pelaksanaan kegiatan yang tidak terarah.

2. Pola pikir lama

Pola pikir lama terhadap penganggaran yang meningkat dari tahun ke tahun juga mesti diubah. Dari hasil wawancara mengatakan bahwa sistem penganggaran yang ada di fakultas ini memang sudah seperti itu sejak dulu, akibatnya tidak adanya efisiensi biaya. Sehingga, penting digarisbawahi di sini bahwa pemahaman terhadap anggaran yang tidak dapat diubah, atau kaku (Santosa, 2018), mesti dijadikan lebih dinamis lagi, karena efisiensi dana dari kegiatan akan dapat meningkatkan

kinerja perguruan tinggi (Alimuddin, Haliah, & Kusumawati, 2022).

Pola pikir yang kaku atau lama (Santoso & Cahyono, 2023) dapat memiliki dampak yang signifikan pada proses pengajuan dan penganggaran dana. Pola pikir lama mengacu pada pandangan dan keyakinan yang telah membentuk cara berpikir dan bertindak selama bertahun-tahun, sering kali tanpa mempertimbangkan perubahan atau dinamika yang terjadi di sekitar mereka. Padahal, kondisi saat ini yang sangat cepat berubah menuntut setiap pengambil keputusan untuk cermat melihat itu.

Salah satu cara di mana pola pikir lama dapat memengaruhi penganggaran adalah melalui ketidakmampuan untuk beradaptasi. Pandangan yang sudah mapan cenderung kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan situasi atau tuntutan baru. Hal ini dapat menghambat pengambilan keputusan yang berani untuk mendukung proyek-proyek baru atau alokasi dana yang berbeda dari biasanya.

Selain itu, pola pikir lama juga sering memunculkan resistensi terhadap perubahan (Laihad, Lengkong, & Saerang, 2019). Pengambil keputusan yang terbiasa dengan cara-cara lama berpikir mungkin enggan menerima ide-ide baru yang mungkin lebih sesuai dengan keadaan terkini. Ini dapat mengakibatkan proyek-proyek inovatif atau solusi yang lebih baik dikesampingkan demi mempertahankan status quo yang familiar. Beberapa pihak di fakultas ini memang masih berpikir dengan pola demikian. Bahkan ada istilah bahwa

bahasa akademik tidak sesuai dengan bahasa keuangan di fakultas tersebut.

Pentingnya tradisi juga dapat menjadi faktor yang menyebabkan kesulitan dalam penganggaran. Pola pikir lama sering kali cenderung menghargai cara-cara lama melakukan hal-hal dan enggan mengadopsi praktik baru. Ini bisa menyebabkan penolakan terhadap alokasi dana untuk proyek-proyek yang mungkin lebih efektif dan efisien.

Dengan demikian, pola pikir lama mungkin mengakibatkan kurangnya inklusi dan partisipasi dalam proses penganggaran. Pengambil keputusan yang cenderung mempertahankan cara berpikir lama mungkin tidak melibatkan berbagai jurusan atau pihak terkait yang mungkin memiliki pandangan berbeda atau pengetahuan yang berharga untuk dimanfaatkan.

Untuk mengatasi dampak negatif dari pola pikir lama dalam penganggaran, organisasi perlu berupaya mempromosikan budaya yang lebih terbuka terhadap perubahan dan inovasi. Ini bisa melibatkan edukasi tentang manfaat dari ide-ide baru, memberikan bukti yang kuat untuk mendukung perubahan, serta menciptakan ruang bagi diskusi dan partisipasi dari berbagai sudut pandang. Memahami bahwa perubahan adalah hal yang pasti dan mengikuti tren yang berkembang adalah langkah penting dalam membuka pikiran untuk pandangan yang lebih luas dan adaptif.

ANALISIS KEBIJAKAN

Kebijakan perencanaan penganggaran di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar menjadi landasan

krusial dalam menjalankan manajemen keuangan yang efektif dan efisien. Masukan dari bendahara fakultas sebagai informan kunci mengindikasikan bahwa kebijakan pimpinan memainkan peran signifikan dalam membimbing dan mengarahkan proses perencanaan anggaran di fakultas tersebut.

Pertama-tama, kebijakan perencanaan penganggaran haruslah jelas, tegas, dan terperinci. Kebijakan yang memiliki ketegasan akan memberikan arahan yang pasti bagi tim yang terlibat dalam penyusunan anggaran. Hal ini mencakup definisi langkah-langkah dan prosedur yang harus diikuti, alokasi dana yang diharapkan, serta persyaratan pelaporan yang harus dipatuhi. Dengan demikian, kejelasan dalam kebijakan memberikan panduan yang diperlukan untuk menjalankan proses perencanaan dengan baik.

Selanjutnya, penetapan prioritas dan tujuan jangka panjang merupakan aspek penting dalam kebijakan perencanaan anggaran. Kebijakan ini harus menegaskan tentang pentingnya memprioritaskan alokasi dana sesuai dengan tujuan jangka panjang fakultas. Dalam konteks ini, kebijakan harus membimbing untuk mengalokasikan dana dengan cerdas, memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan prioritas strategis dan kebutuhan utama fakultas.

Selain itu, mekanisme evaluasi dan pemantauan dalam kebijakan adalah hal yang krusial. Evaluasi berkala dari pelaksanaan perencanaan anggaran perlu diintegrasikan dalam kebijakan. Hal ini membantu memastikan bahwa rencana anggaran berjalan sesuai dengan yang diinginkan dan memberikan kesempatan untuk membuat perubahan jika diperlukan.

Keterlibatan pihak terkait adalah unsur penting dalam kebijakan perencanaan anggaran. Kebijakan harus mendorong transparansi dan partisipasi aktif dari seluruh pihak terkait, termasuk staf fakultas, jurusan, dan unit lainnya. Keterlibatan ini memungkinkan adanya kerja sama tim yang efektif dan memastikan bahwa kebutuhan dan perspektif dari berbagai pihak dipertimbangkan dalam proses perencanaan.

Fleksibilitas dalam kebijakan juga sangat diperlukan, terutama mengingat perubahan yang mungkin terjadi dalam kebutuhan atau kondisi finansial. Fleksibilitas ini harus didukung oleh mekanisme pengambilan keputusan yang memadai, sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan tujuan strategis fakultas.

Secara keseluruhan, kebijakan perencanaan penganggaran yang baik harus mencakup aspek-aspek kunci ini untuk mendukung efektivitas perencanaan anggaran di Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Alauddin Makassar. Dengan kebijakan yang tepat, fakultas dapat memastikan bahwa alokasi dana sesuai dengan tujuan strategis dan mampu memberikan dampak positif dalam mencapai visi jangka panjangnya.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Berdasarkan analisis kebijakan di atas, maka penulis dapat memberikan beberapa alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah kebijakan perencanaan keuangan di Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Alauddin Makassar sebagai berikut:

1. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, yaitu:

- Meningkatkan transparansi dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran dengan melibatkan partisipasi aktif sivitas akademika.
 - Memperkuat sistem pelaporan dan audit keuangan untuk memastikan akuntabilitas penggunaan dana.
 - Menerbitkan laporan keuangan secara berkala dan mudah diakses oleh publik.
2. Optimalisasi pendapatan dan pengeluaran, yaitu:
- Melakukan analisis menyeluruh terhadap sumber-sumber pendapatan fakultas dan potensi pengembangannya.
 - Mencari peluang pendanaan alternatif dari pihak eksternal, seperti kerjasama dengan industri, alumni, atau lembaga donor.
 - Melakukan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran dengan menerapkan skala prioritas dan meminimalisir pemborosan.
3. Penguatan kapasitas SDM, yaitu:
- Meningkatkan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi staf keuangan fakultas untuk meningkatkan keahlian dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan.
 - Membangun budaya sadar biaya dan akuntabilitas di kalangan sivitas akademika.
 - Melibatkan pakar keuangan eksternal untuk memberikan konsultasi dan pendampingan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan keuangan.
4. Pemanfaatan teknologi informasi, yaitu:
- Memanfaatkan teknologi informasi untuk menyederhanakan dan mengotomatisasi proses pengelolaan keuangan, seperti sistem pelaporan keuangan *online*, sistem monitoring anggaran, dan platform *e-procurement*.
 - Meningkatkan literasi digital sivitas akademika terkait pengelolaan keuangan agar dapat memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.
5. Pengembangan kebijakan yang mendukung, yaitu:
- Merumuskan kebijakan keuangan yang jelas, terukur, dan selaras dengan visi dan misi fakultas.
 - Melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan keuangan yang ada dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.
 - Membangun sistem monitoring dan evaluasi untuk memastikan efektivitas kebijakan keuangan dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Dalam hal penyusunan rencana penganggaran kegiatan, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar telah mengikuti mekanisme yang berlaku. Penganggaran di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar belum dapat dikatakan efektif. Kurang intensnya komunikasi dan masih menerapkan pola-pola pikir lama turut memengaruhi kurang optimalnya penganggaran di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar.

Dalam rangka mencapai tujuan dan visi pendidikan yang berkualitas, upaya dalam meningkatkan perencanaan dan penyerapan anggaran menjadi sangat penting. Dengan menerapkan rekomendasi

yang diusulkan, diharapkan fakultas ini dapat mengoptimalkan pengelolaan anggaran, meningkatkan transparansi, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih efektif dan produktif.

Kurangnya komunikasi yang memadai telah menyebabkan peningkatan risiko penyimpangan antara alokasi anggaran dan kebutuhan nyata program studi. Dampak lainnya termasuk penurunan transparansi, potensi ketidaksesuaian prioritas, dan potensi pemborosan sumber daya. Masalah ini tidak hanya memengaruhi efektivitas perencanaan anggaran, tetapi juga citra dan kepercayaan pihak-pihak terkait.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis merekomendasikan kepada:

1. Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin membuat Surat Edaran rencana program dan kegiatan harus sesuai dengan ketersediaan anggaran, karena akibat keterbatasan dana yang tersedia mempengaruhi pelaksanaan rencana kegiatan. Meskipun perencanaan anggaran sudah terstruktur dengan baik, terkadang rencana-rencana tersebut tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena dana yang tersedia tidak mencukupi. Keterbatasan dana ini membawa implikasi besar pada pencapaian tujuan fakultas dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan.
2. Dekan FAH UIN Alauddin Makassar menginstruksikan kepada pihak terkait dalam menjalankan program dan kegiatan harus sesuai yang tercantum dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK). Jika ada kegiatan yang tidak ada
3. Dekan FAH UIN Alauddin Makassar mengeluarkan surat edaran pentingnya mewujudkan transparansi dalam penggunaan dana serta sistem keterbukaan informasi dan komunikasi yang baik dengan semua pihak terkait agar terhindar dari berbagai konflik kepentingan. Jika dana sudah digunakan untuk kegiatan lainnya, maka langkah-langkah seperti mencari sumber dana alternatif atau merencanakan ulang alokasi sumber daya dapat membantu meminimalkan dampak gangguan terhadap rencana kegiatan yang sudah ada.
4. Dekan FAH UIN Alauddin membuat perjanjian kerja sama Balai Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama Sulawesi Selatan untuk mengembangkan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai pengelola keuangan, agar tercipta SDM keuangan yang unggul dan trampil, terutama dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban atas segala program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Karena akibat lambatnya laporan pertanggung-jawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan, maka ini berdampak pada pencairan dana berikutnya dan berakibat penundaan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Keterlambatan laporan juga menunjukkan kelemahan dalam proses administrasi keuangan, yang dapat menghambat efisiensi penggunaan dana.

5. Bagian Perencanaan dan Pengelola Keuangan FAH UIN Alauddin Makassar merumuskan alternatif pembiayaan guna melaksanakan kegiatan di luar Uang Persediaan (UP). Karena tidak

tersedia UP, maka sebagian jurusan di fakultas ini menggunakan dana pribadi agar tetap dapat melaksanakan kegiatan lainnya. Langkah ini adalah sebuah pelanggaran, karena apabila penggunaan dana pribadi tersebut tidak diakui atau tidak bisa dikembalikan, maka berdampak pada kredibilitas pimpinan dan fakultas.

REFERENSI

- Abidin, A. A. (2017). "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Tinggi dalam Upaya Peningkatan Mutu (Studi Kasus pada Perguruan Tinggi Swasta Menengah di Surabaya)". *Jurnal Penjaminan Mutu*, 3(1).
- Adam, & Lanontji, M. (2021). "Kebijakan otonomi Perguruan Tinggi sebagai Dampak Reformasi Keuangan dalam Bidang Pendidikan di Indonesia". *Journal of Education and Teaching*, 2(1).
- Alimuddin, F. H., Haliah, & Kusumawati, A. (2022). "Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja pada Perguruan Tinggi di Indonesia". *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 3(2).
- Ananta, P. S. (2023). *Anggaran Pendidikan Tinggi Indonesia Belum Mencapai Titik Temu*. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
- Anggreni, P., & Suartini, N. W. (2019). "Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia di 3 Perguruan Tinggi dalam Menghadapi Persaingan Global (Studi pada Universitas di Provinsi Bali)". *ISEI: Business and Management Review*, 3(1).
- Caine, V., Clandinin, D. J., & Lessard, S. (2002). *Narrative Inquiry: Philosophical Roots*. London: Bloomsbury Academic.
- Cresswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*. California: Sage.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2002). *Manajemen Keuangan: Materi Pelatihan Terpadu untuk Kepala Sekolah*. Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan dan Asesmen.
- Gitman, L. J., & Zutter, C. J. (2015). *Principles of Managerial Finance*. Edinburgh: Person Education Limited.
- Krippendorff, K. (2004). "Content Analysis: An Introduction to Its Methodology (2 ed.)". California: Sage Publications. Retrieved from https://books.google.co.id/books?id=q65703M3C8cC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
- Laihad, R. A., Lengkong, V. P., & Saerang, R. T. (2019). "Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Resistensi dalam Proses Perubahan Organisasi di Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara di Manado". *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 7(1).

- Lesmana, D. (2011). "Pengaruh Penganggaran Partisipatif, Sistem Pengukuran Kinerja dan Kompensasi Insentif Terhadap Kinerja Manajerial Perguruan Tinggi Swasta di Palembang". *Kajian Ekonomi*, 10(2).
- Lussiana, & Fidiana. (2019). "Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Anggaran Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Melalui Integrasi Sistem Informasi Keuangan". *Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen*, 4(1).
- Lutfiani, N., Rahardja, U., & Manik, I. S. (2020). "Peran Inkubator Bisnis dalam Membangun Startup pada Perguruan Tinggi". *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, 5(1).
- Nazaruddin, I., & Setyawan, H. (2012). "Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah dengan Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi, Motivasi, Desentralisasi, dan *Job Relevant Information* Sebagai Variabel Moderasi". *Journal of Accounting and Investment*, 12(2).
- Nurhuda, H. (2022). "Masalah-Masalah Pendidikan Nasional: Faktor-Faktor dan Solusi yang Ditawarkan". *Dirasah: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Dasar*, 5(2).
- Premananda, N. L., & Latrini, N. M. (2017). "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran pada Pemerintah Kota Denpasar". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3).
- Ratag, W. A., Kumenaung, A. G., & Engka, D. S. (2019). "Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran di Lingkungan Universitas Sam Ratulangi". *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 20(3).
- Rosita, A. (2018). "Perancangan Sistem Informasi Perencanaan dan Kontrol Anggaran di Perguruan Tinggi (Studi Kasus pada Universitas Widyatama Bandung)". *Konferensi Nasional Sistem Informasi (KNSI) 2018*. Pangkalpinang: STMIK Atma Luhur.
- Safitri, U., Nuarizal, A., & Gistituati, N. (2021). "Urgensi Analisis Kebijakan". *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1).
- Santika, E. F. (2023, 52). "Anggaran Pendidikan APBN 2023 Paling Tinggi Sepanjang Sejarah". Retrieved from Katadata: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/14/anggaran-pendidikan-apbn-2023-paling-tinggi-sepanjang-sejarah>
- Santosa, A. B. (2018). "Penganggaran Pendidikan Tinggi dalam Perspektif Allan G. Schick". *Prosiding Konferensi Nasional Ke- 7. Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah (APPPTMA)*.
- Santoso, A. B., & Cahyono, J. P. (2023). "Kebijakan Penganggaran Sektor Publik Berbasis Kinerja". *Journal of Economic Community Service*, 1(1).
- Setiawan, D., & Lenawati, M. (2020). "Peran dan Strategi Perguruan Tinggi dalam Menghadapi Era Society 5.0". *Research: Journal of Computer, Information System, & Technology Management*, 3(1).
- Setyanto, R., RIdloah, S., & Suryasai, A. (2022). "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang". *JMM UNRAM - Master of Management Journal*, 11(3).
- Shah, A. (2007). *Participatory Budgetting*. Washington: The World Bank.
- Suryana, S. (2020). "Permasalahan Mutu Pendidikan dalam Perspektif Pembangunan Pendidikan". *Edukasi*, 14(1).